

PEMODELAN PENGUKURAN KINERJA PEMDA DALAM MENAIKKAN PENDAPATAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA WISATA DAN KOTA BISNIS

Abu Bakar

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
Email: abubakar00012248@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang memfokuskan diri pada pengukuran kinerja pengumpulan pendapatan pajak yang berasal dari hotel, restoran dan hiburan dalam perspektif Pendapatan Asli Daerah Pemda Bandung dan Pemda DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pendapatan pajak, restoran dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah, Kedua bagaimana pertumbuhan Pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan pemda Bandung dan DKI Jakarta, dan bagaimana perbandingan kenaikan pendapatan pajak antara Pemda Bandung dan DKI Jakarta serta bagaimana pengukuran kinerja pengumpulan ketiga jenis pajak. Hasil penelitian menunjukan terjadi pengaruh secara simultan antara ketiga jenis pendapatan pajak dengan pendapatan asli daerah tetapi tidak semua dalam keadaan positif. DKI Jakarta selalu mengumpulkan pendapatan pajak yang lebih tinggi dari Pada Pemda Bandung. Pengumpulan pajak yang lebih tinggi oleh Pemda DKI ternyata tidak menyebabkan rasio sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja pengumpulan pendapatan Pajak Pemda Bandung Lebih baik daripada DKI Jakarta dalam pendapatan pajak hotel dan restoran serta Hiburan. Penelitian merupakan penelitian dari sebelumnya dan sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Filomena Lumur dan Putu Diah Asrida, Ida Bagus Agastya dan Brahmana Wijaya serta I Ketut Suidiana, Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani serta Ni Nyoman Suartini Made Suyana Utama.

Kata kunci, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Pajak, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

This research is a descriptive research that focuses on measuring the performance of collecting tax revenues from hotels, restaurants and entertainment in the perspective of Regional Original Revenues of the Regional Government of Bandung and the Regional Government of DKI Jakarta. The purpose of this study is how the effect of tax revenues, restaurants and entertainment on local revenue, Second, how is the growth of hotel, resort and entertainment tax revenues for the Bandung and DKI Jakarta governments, and how is the comparison between the increase in tax revenues between the Bandung and DKI Jakarta Regional Governments and how to measure the performance of collection three types of taxes. The results of the study show that there is a simultaneous influence between the three types of tax revenue and local revenue, but not all of them are positive and partially significant. DKI Jakarta always collects higher tax revenues than the Bandung local government. The higher tax collection by the DKI Jakarta government does not result in a large contribution ratio to local revenue and the Bandung local government's tax collection performance is better than DKI Jakarta in terms of hotel and restaurant tax revenues and entertainment. This research is a previous study and is in line with several studies conducted by Filomena Lumur and Putu Diah Asrida, Ida Bagus Agastya and Brahmin Wijaya and I Ketut Suidiana, Zainul Fikri and Ronny Malavia Mardani and Ni Nyoman Suartini Made Suyana Utama.

Keywords, Local Revenue, Tax Revenue, Financial Performance

I. PENDAHULUAN

Kota Bandung sangat strategis (Maylanny and Fauzan 2015. 90), salah satu kota yang paling padat (Syarifuddin, M. Noor, and Rohendi 2017,57) dan dikenal sebagai kota-kota wisata dunia sesuai ketetapan UNESCO (Maylanny and Fauzan 2015, 87) atau sering juga disebut sebagai kota dengan sejuta kuliner (Syarifuddin, M. Noor, and Rohendi 2017, 57) Hingga saat ini pun, sebutan „Kota Kembang” atau „Paris van Java” masih merupakan julukan masyarakat luas (1920). Album Bandung Tempo Doeloe, kota ini menyandang berbagai julukan antara lain: The Most European City in the East Indies, Paradise in Exile (pada tahun 1750-an, konon Bandung adalah tempat pembuangan), Bandung Excelcior (1856), The Sleeping Beauty (1884), De Bloem der Indische Bersteden (1896), bahkan Bandung the Garden of Allah (pada 1921, lihat Haryoto Kunto, 1984), Intectuele Center Van Indie (1923), Europe in de Tropen (1930), Kota Pensiunan (1936), Kota Permai dan Ibu Kota Asia Afrika (1950-an). (Indira, Usman Ismanto, and Budiarti Santoso 2013, 72)

Sebagai kota wisata Bandung banyak dikunjungi wisatawan sehingga dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik. Jumlah hotel berbintang dan non bintang di Bandung sebanyak 11.414, jauh lebih besar dari pada DKI Jakarta, sementara tingkat hunian hotel saat ini pada Mei 2021 mencapai 30,58 persen. Rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang tercatat 1,58 hari dan di hotel non bintang selama 1,19 hari. Tamu asing menginap di hotel bintang rata-rata selama 4,79 hari dan di hotel non bintang selama 1,23 hari¹.

DKI Jakarta yang saat ini dikenal sebagai kota pintar dan kota tujuan wisata internasional dan lokal,(Putra 2019) kota perdagangan dan jasa termasuk di juluki sebagai kota metropolitan yang paling padat (Rahman 2015, 6) yang mampu menarik orang dari daerah ke ibu kota, Jakarta adalah ibukota dari Indonesia, (Nurasa 2013, 84) DKI Jakarta diposisikan sebagai *center of exelence* bagi perkembangan perekonomian, kebudayaan, politik, dsb. Kota DKI Jakarta dikenal sebagai salah satu kota besar di dunia, dan menjadi lima besar kota di Indonesia. (Putra 2019, 78) Dengan berbagai ciri tersebut menyebabkan lalu lintas orang per orang cukup tinggi. Sampai tahun 2019 (sebelum padami Covid-19) Jakarta telah memiliki hotel berbintang dan non bintang berjumlah 991 buah dengan ketersediaan kamar sebanyak 74.405 buah dan tingkat hunian rata-rata selama tahun 2019, rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel bintang berkisar antara 2,34 sampai 3,17 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu Indonesia hanya 1,50 sampai 2,10 hari²

Pemkab Bandung saat ini memiliki 1.855 objek kunjungan wisata mulai dari objek wisata sejarah hingga wisata buatan. Jumlah terbanyak adalah objek wisata kuliner sebanyak 78,06% disusul wisata belanja sebanyak 17,57%³ Sementara objek wisata di DKI Jakarta tidak sebanyak di Bandung tetapi dikunjungi tidak lebih dari 32.222.6616 orang pada tahun 2018 dan pada tahun berikutnya naik tipis menjadi 32.982.472 orang. Tujuan utama kunjungan wisata pada tahun 2018 adalah Taman Impian Jaya Ancol yang dikunjungi

¹bps jawa barat, statistik hotel dan tingkat penghunian kamar hotel dki jakarta 2020,

²bps dki, statistik hotel dan tingkat penghunian kamar hotel DKI Jakarta 2020,hal 19)

³<http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-objek-wisata-berdasarkan-kategori/resource/bb589eba-06ca-47cb-bc85-c4b1a8d67c8a>

tidak kurang dari 17,5 juta orang. Kunjungan wisatawan terbesar pada tahun 2019 tidak lagi Ancol, melainkan Monumen Nasional berjumlah 12,1 juta orang⁴.

Hotel, restoran dan tempat hiburan merupakan sumber pendapatan asli daerah baik untuk Pemda Bandung maupun DKI Jakarta. Oleh karenanya penelitian ini memfokuskan pada Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan dalam perspektif Pendapatan Asli Daerah Pemda Bandung dan DKI Jakarta yang dapat diturunkan menjadi 1) bagaimana pengaruh pajak hotel, restoran dan hiburan secara simultan dan bersama sama berpengaruh terhadap pendapatan Asli daerah, 2) Bagaimana perbandingan pertumbuhan pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan di kedua daerah tersebut, 3) bagaimana perbandingan kenaikan pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan Pemda Bandung dan DKI Jakarta dan 4) Bagaimana perbandingan kinerja pertumbuhan pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan di Pemda Bandung dan Pemda DKI Jakarta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. (Rahmayanti 2016, 41) Undang-undang tersebut mengharuskan presiden, gubernur atau bupati dan Walikota menyampaikan laporan kepada DPR/DPRD, (Albugis 2016, 79) Adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, (Kurniati 2016, 1291) kewajiban penyusunan laporan keuangan (Urip Santoso 2008, 16) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas (Harahap 2020, 30). Dan dalam pelaksanaannya harus menggunakan Standar akuntansi Pemerintahan-SAP (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005). (Ratifah 2014, 30)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, (Novtania Mokoginta, Linda Lambey 2017) (Novtania Mokoginta, Linda Lambey 2017, 877) yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintahan (Dewi and Mimba 2014, 455) yang bersifat kaku dan terikat dengan berbagai peraturan (KhafiyyaNo, n.d., 4) dan berbasis aktual (Kurniati 2016, 1297) walau untuk *account* tertentu masih menganut kas basis untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Pratiwi and Pamungkas 2018, 60) Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi, (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 57) yang bertujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang terjadi (KhafiyyaNo, n.d., 2). Laporan Keuangan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban (Urip Santoso 2008, 18) yang disajikan memiliki kualitas yang tinggi. Ukuran kualitas laporan keuangan adalah memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu, mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipaham. (Kurniati 2016, 1292) (Wati, Herawati, and Sinarwati 2014, 2).

⁴ BPS DKI Jakarta tahun 2021 yang berasal dari dinas pariwisata provinsi dki jakarta

2.2 Analisa Kinerja Keuangan

Laporan Keuangan pemda perlu dianalisa untuk mengetahui pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan (Setia 2008, 24) serta memonitor realisasi biaya dengan biaya yang dianggarkan (Marfiana and Kurniasih, n.d., 2). Kinerja keuangan menurut Sucipto adalah " penentuan langkah-langkah spesifik yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba".(Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 58) Atau suatu pengukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Fajar Nugroho 2012, 1). **atau** tingkat pencapaian kerja keuangan dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan.(Agustina 2013, 3) Sementara pengertian analisa kinerja keuangan merupakan sebuah pencapaian dari apa yang telah direncanakan oleh organisasi (Harahap 2020, 34) dan sebuah proses peninjauan kritis yang meninjau, menghitung, mengukur, menginterpretasikan, dan memberikan solusi bagi keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu (Fazlurahman, Fatriananda, and Jauhari 2020, 58) yang penilaiannya menggunakan berbagai analisis kinerja keuangan (Fajar Nugroho 2012, 1). Tujuan analisa kinerja keuangan Pertama, membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan komunikasi kelembagaan (Harahap 2020, 34). Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan indikator keuangan yang ditetapkan (Agustina 2013, 3) pada umumnya dalam bentuk rasio keuangan (Kurrohman 2013, 1).

2.3 Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran (Setia 2008, 42) dan merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah itu sendiri (AKBAR 2016, 34) dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta menciptakan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu daerah(Wijaya and Sudiana 2016, 1388) yang diperoleh sesuai dengan peraturan atau ketentuan perundangan yang berlaku (Zainul Fikri and Marn, n.d., 87) dan berasal dari sumber ekonomi daerah. (Kawulur, Kolenangan, and C. Wauran 2019, 116) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dana yang berasal dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. (Rinaldi 2012, 108)(Cahyono 2020)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Hadi dan Saputri 2018, 14) Pajak daerah merupakan sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan(Wijaya and Sudiana 2016, 1388) dan kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan. (Sandy Kawulur, Rosalina A. M. Kolenangan 2019, 111) (Mosal 2013, 378) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga atau untuk pengeluaran daerah (Butarbutar 2014, 699). Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dan lain sebagainya (Riftiasari 2018, 3).

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel (Zainul Fikri and Marn, n.d., 89) atau bangunan yang khusus disediakan untuk menginap/istirahat, dengan berbagai pelayanan, dan atau fasilitas serta dipungut bayaran (Zainul Fikri and Marn,

n.d.88) Pendapatan hotel di pusat bisnis dan wisata bisa ditingkatkan secara optimal sebagaimana di Yogyakarta.

2.4 Penelitian terdahulu,

Beberapa penelitian terdahulu yang mengambil tema penelitian sebelumnya adalah sebagaimana di bawah ini:

Tabel 1. Penelitian Tentang Sejenis Tentang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
Filomena Lumur dan Putu Diah Asrida	Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar Tahun 2015-2018 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar)	Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
Ida Bagus Agastya Brahmama Wijaya1 I Ketut Suidiana	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015	Kunjungan wisatawan, Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah	Kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap retribusi obyek wisata. Dan Kunjungan wisatawan, pajak hotel restoran dan retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Zainul Fikri Ronny Malavia Mardani	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016)	Pajak hotel, Restoran dan Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah	Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Ni Nyoman Suartini Made Suyana Utama	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar tahun 1991 - 2010	Kunjungan wisatawan, Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah	Kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 1991 -2010.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mengharuskan peneliti menghadirkan data mayor dan data minor. Data mayor adalah pendapatan pajak dan Pendapatan Asli Daerah Pemda Bandung dan DKI Jakarta. Untuk mengukur pertumbuhan Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Rekreasi digunakan pendekatan dua yaitu pendekatan statistik dan pendekatan manajemen keuangan. Pendekatan manajemen keuangan digunakan sebagai pelengkap untuk menjawab berbagai masalah penelitian yang kurang mendalam dalam pendekatan statistik seperti berapa persen pengaruh masing-masing pendapatan pajak terhadap pendapatan asli daerah dalam bentuk rupiah maupun persentase atau seberapa besar pengaruh kenaikan pendapatan pajak setiap tahun terhadap PAD rata-rata dalam lima tahun terakhir.

3.1 Pendekatan Statistik dan Hipotesis Penelitian

Uji Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji hipotesis, yaitu uji Anova, Koefisien determinan (R²) dan Regresi Linear Berganda. Uji Linear Berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah secara simultan. Hipotesis awal untuk memperkuat pendekatan keuangan sebagaimana di bawah ini:

H1= ada pengaruh positif pendapatan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Bandung dan DKI Jakarta

H2= Ada pengaruh positif pendapatan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Bandung dan DKI Jakarta

H3= Ada pengaruh positif pendapatan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Bandung dan DKI Jakarta.

3.2 Pendekatan Keuangan

Penggunaan pendekatan keuangan ini digunakan peneliti untuk melengkapi pendekatan statistik sebagaimana di bawah ini:

1) Pengaruh Pajak terhadap PAD

Pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh secara parsial dan simultan dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$P1 = \text{PHt/PAD} \dots\dots\dots(1)$$

$$P2 = \text{PR/PAD} \dots\dots\dots(2)$$

$$P3 = \text{PHb/PAD} \dots\dots\dots(4)$$

$$P4 = \text{+(P1+P2+p3)/PAD} \dots\dots\dots(5)$$

P1 = peranan Pajak Hotel pada PAD

P2 = Peranan Pajak Restoran pada PAD

P3 = Peranan Pajak Hiburan pada PAD

P3 = Peranan simultan pajak hotel, restoran dan hiburan pada PAD

2) Pertumbuhan

Pendekatan pertumbuhan merupakan hasil bagi antara selisih data keuangan tahun berjalan dengan sebelumnya dengan data keuangan tahun sebelumnya yang dapat diformulakan sebagai mana di bawah ini:

$$Y1 = \text{PHt (t) - PH (t-1)/PH (t) x 100%} \dots\dots\dots(5)$$

$$Y2 = \text{PR (t) -PR (t-1)/PR (t) x 100} \dots\dots\dots(6)$$

$$Y3 = \text{PHb(t)-PHb (t-1)/pHb(t) x 100%} \dots\dots\dots(7)$$

Y1 = Kenaikan Pendapatan Pajak Hotel

Y2 = Kenaikan pendapatan pajak restoran

Y3 = Kenaikan pendapatan pajak hiburan

PHt = Pajak Hotel

PR = pajak Restoran

PHb = Pajak Hiburan

t = tahun berjalan

t-1 = tahun sebelumnya

3) Klasifikasi pertumbuhan

Pertumbuhan pajak hotel, restoran dan hiburan perlu dilakukan penskalaan dan pembobotan untuk mengukur kinerja pencapaian dengan menggunakan skala likert (*Likert scale*) (Yulianti and Silvy 2013, 62). Penentuan skala dilakukan dengan hasil bagi antara selisih hasil tertinggi dan hasil terendah. Hasil penghitungan merupakan skala yang akan dengan skala yang diinginkan; 5⁵. Hasil penskalaan 1 berarti rendah sekali. 2, Rendah. 3, sedang dan 4 berarti tinggi serta 5 sebagai tinggi sekali.

4) Sumbangsih Pendapatan Pajak Terhadap PAD

Untuk menilai sumbangsih pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah sebagaimana di bawah ini:

$$Sp1 = (P_{Ht} / PAD) \times 100\% \dots\dots\dots(8)$$

$$SP2 = (PR / PAD) \times 100 \% \dots\dots\dots(9)$$

$$SP3 = (PHb / PAD) \times 100\% \dots\dots\dots(10)$$

Setoran pada PAD

SP3 = Sumbangsih Pendapatan Pajak hiburan pada PAD

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Pendapatan Pajak Terhadap PAD

4.1.1 Deskriptif Penelitian

Pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan untuk dua wilayah yang dikenal sebagai kota wisata dan kota bisnis memperlihatkan jumlah yang tidak sama. Secara keseluruhan pendapatan pajak dari ketiga sumber memperlihatkan posisi Jumlah maksimal dan terkecil ataupun rata-rata DKI Jakarta lima sampai sembilan kali lipat lebih besar dari pada Bandung. Lebih jelasnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. Deskripsi Penelitian

Descriptive Statistics					
Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Bandung (1.000.000)					
Pajak Hotel	5	215.285	314.144	280.064	38.887
Pajak Restoran	5	181.868	368.643	279.284	72.464
Pajak Hiburan	5	50.449	110.088	80.830	22.251
Pendapatan Asli Daerah	5	1.859.695	2.578.457	2.342.152	323.882
DKI Jakarta (1.000.000)					
Pajak Hotel	5	1.276.286	1.768.198	1.568.993	199.663
Pajak Restoran	5	2.290.255	3.615.263	2.851.867	537.613
Pajak Hiburan	5	608.800	860.666	765.508	98.031
Pendapatan Asli Daerah	5	33.686.177	45.707.400	40.702.044	5.146.609
Valid N (listwise)	5				

Sumber: hasil pengolahan statistik di dasarkan atas laporan keuangan yang sudah di audit

Tabel 2 memberikan gambaran rata-rata Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah Pemda DKI Jakarta lebih tinggi dari pada pendapatan Pemda Bandung. Besarannya antara tujuh kali hingga sembilan belas kali lipat. 2) Perbedaan yang paling dominan adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah DKI

⁵Hal 73 STUDI *FINANCIAL MANAGEMENT BEHAVIOR* PADA MASYARAKAT SURABAYA Naila Al Kholilah Rr. Iramani

Jakarta. (3) Jumlah pendapatan terbesar untuk Pemda Bandung berasal dari Pajak Restoran yang menandakan wisatawan di Bandung lebih mengutamakan kuliner dari pada bermalam apalagi mencari hiburan. Model ini sejalan dengan pendapatan Pemda Jakarta walaupun pendapatan jenis ini lebih tinggi sepuluh kali lipat. (4) jumlah pendapatan terkecil DKI Jakarta adalah pendapatan pajak hiburan tetapi jumlah tersebut masih lebih besar dari pada pendapatan minimal yang masuk ke kas Pemda Bandung lebih dari 11 kali lipat.

4.1.2 Pendekatan Statistik

Hasil uji statistik memperlihatkan pengaruh pendapatan pajak terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagaimana di bawah ini:

Tabel 3 Resume Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients	t	Sig.
		B		
Bandung	(Constant)	3491182E+12	,363	,778
	x1	6,000	,914	,528
	x2	-,445	-,133	,916
	x3	5,405	,702	,610
DKI Jakarta	(Constant)	5,02994E+12	0,275	0,829
	x1	42,598	0,643	0,636
	x2	0,471	0,045	0,972
	x3	-42,464	-0,419	0,747
R Square Bandung		,929		
R Square DKI Jakarta		,862		

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa (1) pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan secara simultan memberikan pengaruh pada PAD Bandung sebesar 92,9% dan sisanya disebabkan faktor lain. (2) Pendapatan pajak hotel memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan daerah Pemkab Bandung dan DKI Jakarta tetapi pengaruh pendapatan hotel untuk PAD DKI Jakarta lebih kecil dari pada Pemkab Bandung dan pengaruh tersebut tidak signifikan (diatas) 0,005. Artinya Hipotesis 1 ditolak. (3) Hipotesis 2 ditolak karena Pendapatan pajak restoran berpengaruh negatif dan tidak signifikan untuk pemda Bandung sementara untuk DKI Jakarta juga ditolak karena tingkat signifikan pendapatan tersebut diatas 5%. (4) hasil uji tingkat signifikan Pajak Hiburan memperlihatkan hipotesis 3 tidak terbukti diatas 5% dan pendapatan pajak hiburan DKI berpengaruh negatif. (5) Besarnya sumbangsih pendapatan tiga jenis pajak terhadap pendapatan asli daerah pemda Bandung dan DKI Jakarta secara nominal tidak dapat diketahui sehingga perlu dilakukan analisis keuangan model lain.

Hasil penelitian di atas tidak seluruhnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Filomena Lumur dan Putu Diah Asrida, Ida Bagus Agastya dan Brahmana Wijaya serta I Ketut Suidiana, Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani serta Ni Nyoman Suartini Made Suyana Utama karena pengaruh ketiga jenis pendapatan terhadap PAD kedua pemda sangat kecil terutama DKI Jakarta (Lihat lampiran 3) yang tidak sampai 3,85% untuk Pajak Hotel, dan 7,02% untuk Pajak restoran dan 1,89% untuk pajak hiburan. Penyebab kedua

adalah walaupun tiga pendapatan pajak DKI jauh lebih tinggi dari Pemda Bandung tetapi pengaruh terhadap PAD DKI sangat kecil sekali.

4.1.3 Pendekatan Keuangan

1) Peranan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap PAD Pemda Bandung dan DKI Jakarta

Melengkapi analisa pendekatan statistik di atas, pendekatan keuangan akan memperlihatkan besarnya peranan pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan secara nominal sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. Rasio Peranan Pendapatan Pajak terhadap PAD Bandung dan DKI Jakarta Tahun 2015 - 2019

Pemda	Bandung					Jakarta				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Pajak Hotel terhadap PAD	11,60%	12,80%	11,50%	11,70%	12,30%	3,80%	4,10%	3,60%	4,00%	3,90%
Rasio Pajak Restoran terhadap PAD	9,80%	11,20%	10,80%	12,70%	14,50%	6,80%	6,70%	6,30%	7,30%	7,90%
Rasio Pajak Hiburan terhadap PAD	2,70%	3,20%	3,30%	4,30%	3,50%	1,80%	2,10%	1,70%	1,90%	1,90%
Rasio Jumlah pendapatan Pajak terhadap PAD	24,10%	27,20%	25,60%	28,60%	30,30%	12,40%	12,80%	11,50%	13,20%	13,70%

Catatan. Data di oleh dari Laporan Keuangan Provinsi yang telah di audit BPKP tahun 2015-2019

Dari tabel 3 dapat diketahui secara parsial maupun simultan peranan pendapatan tiga jenis pajak setiap tahun dan setiap pemda memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan dapat disimpulkan sebagaimana berikut (1) Pengaruh parsial Pendapatan Pajak hotel terhadap Pendapatan Daerah Bandung tahun 2015 hingga 2019 bergerak mulai dari 11,6% hingga 12,30% semantara DKI Jakarta bergerak mulai dari 3,8% hingga 3,9% dan terlihat pendapatan tersebut memberikan pengaruh yang lebih besar bagi PAD pemda Bandung walaupun secara nominal jumlah pendapatan Pajak Hotel di DKI Jakarta jauh lebih tinggi. (2) Pengaruh Pendapatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemda Bandung memberikan pengaruh yang lebih besar dari pada pendapatan sejenis di Pemda DKI Jakarta walaupun secara nominal Pendapatan Pajak Restoran DKI Jakarta jauh lebih tinggi dari pada pendapatan sejenis di Pemda Bandung. Besarnya pengaruh tersebut bergerak mulai dari 9,80 di tahun 2015 hingga 14,5 di tahun 2019 untuk Pemda Bandung dan untuk DKI Jakarta mulai dari 6,8% di tahun 2015 hingga 7,9% ditahun 2019. (4) Rasio pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah baik di Pemda Bandung maupun Pemda DKI Jakarta yang bergerak mulai dari 1,8% ditahun 2015 hingga 1,90 di tahun 2019 untuk Pemda DKI Jakarta. Sementara pengaruh parsial pendapatan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bandung jauh lebih tinggi dari DKI Jakarta mulai dari 2,7% di tahun 2015 hingga 3,5% ditahun 2019 (5) pengaruh secara simultan ketiga pendapatan pajak tersebut, Pemda Bandung lebih dominan dari pada DKI Jakarta. Pengaruh simultan tersebut mulai dari 24,10% ditahun 2015 hingga 2019 menjadi 30,3% ditahun 2019. Sementara DKI mulai dari 12,8% ditahun 2015 hingga 13,70% ditahun 2019 (6) Pengaruh Pendapatan Pajak terhadap PAD secara simultan memperlihatkan ketergantungan Pemda Bandung lebih tinggi dari

pada DKI Jakarta yang menunjukkan tingkat ketergantungan Pemda Bandung lebih dominan dari pada tingkat ketergantungan Pemda DKI Jakarta.

2) **Pertumbuhan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Bandung dan DKI Jakarta**

Berdasarkan Lampiran I pendapatan Kota Bandung dan DKI Jakarta yang berasal dari Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan dari tahun 2015 hingga 2019 memperlihatkan perkembangan sebagaimana di bawah ini:

a. Pendapatan Pajak Hotel Penda Bandung dan DKI Jakarta

Dari lampiran pertama (tabel 5) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Pajak Hotel yang diterima pemda *Bandung* dari tahun 2015 sampai 2019 dapat disimpulkan (1) Pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari pajak hotel selalu mengalami pertumbuhan dalam 5 tahun, mulai dari Rp 215,2 miliar pada tahun 2015 hingga Rp 314,1 miliar pada tahun 2019. (2) Rata-rata pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari Pajak Hotel adalah sebesar Rp 280 miliar, dimana tahun 2015 dan 2016 memiliki pendapatan di bawah rata-rata sedangkan tahun 2017, 2018, dan 2019 memiliki pendapatan di atas rata-rata. (3) Jumlah perubahan pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari Pajak Hotel dalam 5 tahun selalu mengalami fluktuasi, walaupun terdapat pertumbuhan pendapatan. (4) Tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan tertinggi, yaitu 59,4 miliar rupiah dengan persentase 27,61%. Sementara itu, tahun 2018 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan terendah, yaitu Rp 5,3 miliar dengan persentase 1,82%. (5) Rata-rata perubahan pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari Pajak Hotel adalah 21,8 miliar rupiah dengan persentase 9,32%, dimana hanya tahun 2016 yang memiliki perubahan pendapatan di atas rata-rata sedangkan tahun lainnya memiliki perubahan pendapatan di bawah rata-rata.

Dari tabel tersebut juga diketahui Pendapatan *DKI Jakarta* yang berasal dari Pajak Hotel dari tahun 2015 hingga 2019 memperlihatkan perkembangan sebagaimana di bawah ini. (1) Pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak hotel selalu mengalami pertumbuhan dalam 5 tahun, kecuali pada tahun 2015 yang mengalami penurunan pendapatan. Pendapatan pajak hotel berkisar mulai dari 1,2 triliun rupiah pada tahun 2015 hingga 1,7 triliun rupiah pada tahun 2019. (2) Rata-rata pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak hotel adalah sebesar 1,5 triliun rupiah, dimana tahun 2015, 2016, dan 2017 memiliki pendapatan di bawah rata-rata sedangkan tahun 2018 dan 2019 memiliki pendapatan di atas rata-rata. (3) Jumlah perubahan pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak hotel dalam 5 tahun selalu mengalami fluktuasi atau naik turun, walaupun terdapat pertumbuhan pendapatan. (4) Tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan tertinggi, yaitu 223,5 miliar rupiah dengan persentase 17,51%. Sementara itu, tahun 2015 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan terendah, yaitu -107,8 miliar rupiah dengan persentase -7,79% (mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2014). (6) Rata-rata perubahan pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak hotel adalah 76 miliar rupiah dengan persentase 5,38%, dimana tahun 2015, 2017, dan 2019 memiliki perubahan di bawah rata-rata sedangkan tahun 2016 dan 2018 memiliki perubahan di atas rata-rata.

b. Pendapatan Pajak Restoran Pemda Bandung dan DKI Jakarta

Dari tabel 5 (lampiran) terlihat bahwa pendapatan pajak yang berasal dari restoran untuk Kota Bandung sebagai berikut (1) Pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari Pajak Restoran selalu mengalami pertumbuhan dalam 5 tahun, mulai dari 181,8 miliar rupiah pada tahun 2015 hingga 368,6 miliar rupiah pada tahun 2019.(2)Rata-rata pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari Pajak Restoran adalah sebesar 279,2 miliar rupiah, dimana tahun 2015, 2016, dan 2017 memiliki pendapatan di bawah rata-rata sedangkan tahun 2018 dan 2019 memiliki pendapatan di atas rata-rata. (3)Jumlah perubahan pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari Pajak Restoran dalam 5 tahun selalu mengalami fluktuasi atau naik turun, walaupun terdapat pertumbuhan pendapatan. (4)Tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan tertinggi, yaitu 59,9 miliar rupiah dengan persentase 32,95%. (4) Rata-rata perubahan pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari pajak restoran adalah 45,1 miliar rupiah dengan persentase 21,15%, dimana tahun 2016 dan 2018 memiliki perubahan pendapatan di atas rata-rata sedangkan tahun 2015, 2017, dan 2019 memiliki perubahan pendapatan di bawah rata-rata.

Dari tabel 5 pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari Pajak Restoran selama lima tahun dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari Pajak Restoran selalu mengalami pertumbuhan, mulai dari 2,2 triliun rupiah pada tahun 2015 hingga 3,6 triliun rupiah pada tahun 2019. (2) Rata-rata pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak restoran adalah sebesar 2,8 triliun rupiah, dimana tahun 2015, 2016, dan 2017 memiliki pendapatan di bawah rata-rata sedangkan tahun 2018 dan 2019 pendapatan tumbuh di atas rata-rata. (3) Jumlah perubahan pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak restoran dalam 5 tahun selalu mengalami fluktuasi atau naik turun, walaupun terdapat pertumbuhan pendapatan. (4) Tahun 2015 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan tertinggi, yaitu 467,4 miliar rupiah dengan persentase 25,65%. Sementara itu, tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan terendah, yaitu 163,1 miliar rupiah dengan persentase 7,13%. (5) Rata-rata perubahan pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak restoran adalah 358,4 miliar rupiah dengan persentase 14,84%, dimana tahun 2015, 2018, dan 2019 memiliki perubahan pendapatan di atas rata-rata sedangkan 2016 dan 2017 memiliki perubahan pendapatan di bawah rata-rata.

c. Pendapatan Pajak Hiburan Pemda Bandung dan DKI Jakarta

Dari tabel 5 (lampiran I) pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari pajak hiburan dapat disimpulkan bahwa (1) Pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari pajak hiburan selalu mengalami pertumbuhan dalam 4 tahun, namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Pendapatan pajak hiburan mulai dari 50,4 miliar rupiah pada tahun 2015 hingga 110 miliar rupiah pada tahun 2018. (2) Rata-rata pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari pajak hiburan adalah sebesar 80,8 miliar rupiah, dimana tahun 2015 dan 2016 memiliki pendapatan di bawah rata-rata sedangkan tahun 2017, 2018, dan 2019 memiliki pendapatan di atas rata-rata. (3) Jumlah perubahan pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari pajak restoran

dalam 5 tahun selalu mengalami fluktuasi atau naik turun, walaupun terdapat pertumbuhan pendapatan selama 4 tahun. (4) Tahun 2018 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan tertinggi, yaitu 24,9 miliar rupiah dengan persentase 29,37%. Sementara itu, tahun 2019 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan terendah, yaitu -21,3 miliar rupiah dengan persentase -19,43% (mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2017). (5) Rata-rata perubahan pendapatan Pemda Kota Bandung yang berasal dari pajak hiburan adalah 9,5 miliar rupiah dengan persentase 18,66%, dimana tahun 2015 dan 2019 memiliki perubahan pendapatan di bawah rata-rata sedangkan tahun 2016, 2017, dan 2018 memiliki perubahan pendapatan di atas rata-rata.

Pendapatan pajak hiburan DKI Jakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak hiburan selalu pertumbuhan dalam 5 tahun, kecuali pada tahun 2017, mulai dari 608,7 miliar rupiah pada tahun 2015 hingga 860,6 miliar rupiah pada tahun 2019. (2) Rata-rata pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak hiburan adalah sebesar 765,5 miliar rupiah, dimana hanya tahun 2015 yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata sedangkan tahun lainnya memiliki pendapatan di atas rata-rata. (3) Jumlah perubahan pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak hiburan dalam 5 tahun selalu mengalami fluktuasi atau naik turun, walaupun terdapat pertumbuhan pendapatan pada setiap tahun selain tahun 2017 (4) Tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan tertinggi, yaitu 160,7 miliar rupiah dengan persentase 26,4%. Sementara itu, tahun 2017 merupakan tahun dengan jumlah perubahan pendapatan terendah, yaitu -15 miliar rupiah dengan persentase -1,95% (mengalami penurunan pendapatan dari tahun 2016). (5) Rata-rata perubahan pendapatan Pemda DKI Jakarta yang berasal dari pajak hiburan adalah 71,6 miliar rupiah dengan persentase 11,87%, dimana tahun 2015, 2016, dan 2018 memiliki perubahan pendapatan di atas rata-rata sedangkan 2017 dan 2019 memiliki perubahan pendapatan di bawah rata-rata.

4.2 Perbandingan Pendapatan Pajak Pemda Bandung dan DKI Jakarta

Perbandingan kinerja pemerintah Bandung dan DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan pajak sektor hotel, restoran dan hiburan tampak sebagaimana tabel 5 (*lampiran*) di bawah ini:

4.2.1 Perbandingan Pajak Hotel Bandung dan DKI Jakarta

Apabila dibandingkan satu sama lain, pendapatan pajak hotel memperlihatkan bahwa (1) Secara umum, selama 5 tahun, Bandung memiliki pendapatan pajak hotel dan perubahan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta. Namun, Bandung memiliki persentase perubahan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta. (2) Tahun 2015, Pemda Kota Bandung memiliki jumlah perubahan pendapatan dan persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pemda DKI Jakarta. Jumlah perubahan pendapatan di Kota Bandung adalah 10,6 miliar rupiah dengan persentase 5,18%, sedangkan jumlah perubahan pendapatan di DKI Jakarta adalah -107,8 miliar rupiah dengan persentase -7,79%. (3) Tahun 2016, Pemda Kota Bandung memiliki

jumlah perubahan pendapatan pajak hotel yang lebih kecil dibandingkan dengan Pemda DKI Jakarta. Kota Bandung memiliki jumlah perubahan pendapatan sebesar 59,4 miliar rupiah sedangkan DKI Jakarta adalah 223,5 miliar rupiah. Meskipun demikian, Pemda Kota Bandung memiliki persentase perubahan yang lebih besar (27,62%) dibandingkan dengan Pemda DKI Jakarta (17,51%). (4) Tahun 2017, jumlah perubahan pendapatan pajak hotel baik di Bandung maupun DKI Jakarta mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2016. Jumlah perubahan pendapatan pajak hotel di pemda Bandung mengalami penurunan menjadi 20,6 miliar rupiah sedangkan di Jakarta mengalami penurunan menjadi 60,8 miliar rupiah pada tahun 2017. Dari sisi pertumbuhan persentase, Bandung memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta, yaitu Bandung sebesar 7,51% dan Jakarta sebesar 4,06%. (5) Tahun 2018, Bandung mengalami penurunan yang signifikan terhadap perubahan pendapatan pajak hotel dari tahun 2017 menjadi 5,3 miliar rupiah. Kebalikannya, Jakarta mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2017 menjadi 179,3 miliar rupiah. Dengan begitu, Bandung memiliki nilai persentase perubahan yang lebih rendah dibandingkan Jakarta. Persentase perubahan pendapatan pajak hotel di Bandung hanya 1,82%, sementara Jakarta 11,49%. (6) Tahun 2019, merupakan kebalikan dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2018. Pada tahun ini, Bandung mengalami kenaikan perubahan pendapatan menjadi 13,3 miliar rupiah, sementara Jakarta mengalami penurunan menjadi 28,1 miliar rupiah. Sejalan dengan hal tersebut, persentase perubahan pendapatan Bandung mengalami kenaikan menjadi 4,45%, sementara Jakarta mengalami penurunan menjadi 1,62%. (7) Rata-rata perubahan pendapatan pajak hotel per tahun Pemda Kota Bandung adalah 21,8 miliar rupiah dengan persentase 9,32%, sementara untuk Pemda DKI Jakarta adalah 76,8 miliar rupiah dengan persentase 5,38%. Perubahan pendapatan pajak hotel yang di atas rata-rata terjadi pada tahun 2016 untuk Pemda Kota Bandung dan pada tahun 2016 dan 2018 untuk Pemda DKI Jakarta.

4.2.2 Pajak Restoran Pemda Bandung dan DKI Jakarta

Apabila dibandingkan perilaku pendapatan pajak dari restoran kedua daerah adalah (1) Secara umum, selama 5 tahun, Bandung memiliki pendapatan pajak restoran dan perubahan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta. Namun, Bandung memiliki persentase perubahan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta. (2) Tahun 2015, Pemda Kota Bandung memiliki jumlah perubahan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pemda DKI Jakarta. Jumlah perubahan pendapatan di Kota Bandung hanya sebesar 39,1 miliar rupiah sedangkan di Jakarta sebesar 467 miliar rupiah. Dari sisi persentase perubahan pendapatan, kedua kota tersebut memiliki nilai yang tidak berbeda jauh, yaitu Bandung 27,47% dan DKI Jakarta 25,65%. (3) Tahun 2016, Pemda Kota Bandung memiliki jumlah perubahan pendapatan pajak restoran yang lebih rendah dari pada Pemda DKI Jakarta. Namun, Bandung memiliki nilai persentase perubahan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Pada tahun 2016, Bandung memiliki jumlah perubahan pendapatan sebesar 59,9 miliar rupiah dengan persentase 32,95%. Sementara itu, Jakarta memiliki jumlah perubahan pendapatan sebesar 163,1 miliar rupiah dengan persentase 7,13%. (4) Tahun 2017, sama seperti tahun sebelumnya. Bandung memiliki jumlah perubahan pendapatan pajak restoran yang jauh lebih kecil dari pada DKI Jakarta, namun memiliki persentase perubahan pendapatan yang lebih besar. Jumlah perubahan pendapatan pajak restoran beserta persentase

perubahannya di Bandung dan DKI Jakarta berturut-turut adalah 36,9 miliar rupiah dengan persentase 15,29% dan 296,9 miliar rupiah dengan persentase 12,10%. (4) Tahun 2018, baik Bandung maupun DKI Jakarta, sama-sama mengalami kenaikan jumlah perubahan pendapatan dari tahun 2017, masing-masing menjadi 46,6 miliar rupiah dan 399,6 miliar rupiah. Kemudian, Bandung memiliki persentase perubahan pendapatan yang lebih tinggi sedikit dari pada DKI Jakarta, yaitu 16,72% untuk Bandung dan 14,53% untuk DKI Jakarta. (5) Tahun 2019, Pemda Kota Bandung memiliki jumlah perubahan pendapatan pajak restoran dan persentase perubahan yang lebih rendah dibandingkan dengan Pemda DKI Jakarta. Untuk Bandung, 43,2 miliar dengan persentase 13,30%. Untuk DKI Jakarta, 465,2 miliar rupiah dengan persentase 14,77%. (6) Rata-rata perubahan pendapatan pajak restoran per tahun Pemda Kota Bandung adalah 45,1 miliar rupiah dengan persentase 21,15%, sementara untuk Pemda DKI Jakarta adalah 358,4 miliar rupiah dengan persentase 14,84%. Perubahan pendapatan pajak restoran yang di atas rata-rata terjadi pada tahun 2016 dan 2018 untuk Pemda Kota Bandung dan pada tahun 2015, 2018, dan 2019 untuk Pemda DKI Jakarta. Posisi Pendapatan Pajak Hiburan di Bandung dan DKI Jakarta

4.2.3 Pajak hiburan Pemda Bandung dan DKI Jakarta

Perbandingan Pendapatan Pajak Hiburan kedua daerah memperlihatkan bahwa (1) Secara umum, selama 5 tahun, Pemda Bandung memiliki pendapatan Pajak Hiburan dan perubahan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta. Namun, Bandung memiliki persentase perubahan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta. (2) Tahun 2015, Pemda Kota Bandung memiliki jumlah perubahan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pemda DKI Jakarta. Jumlah perubahan pendapatan di Kota Bandung hanya sebesar 9,4 miliar rupiah sedangkan di Jakarta sebesar 106,3 miliar rupiah. Dari sisi persentase perubahan pendapatan, kedua kota tersebut memiliki nilai yang tidak berbeda jauh, yaitu Bandung 23,11% dan DKI Jakarta 21,16%. (3) Tahun 2016, perubahan pendapatan pajak hiburan pada kedua daerah tersebut sama-sama mengalami kenaikan sebesar 19,3 miliar rupiah untuk Bandung dan 160,7 miliar rupiah untuk Jakarta. Bandung tetap memiliki persentase perubahan pendapatan yang lebih tinggi, yaitu 38,39%, dibandingkan DKI Jakarta, yaitu 26,40%. (4) Tahun 2017, Bandung memiliki jumlah perubahan pendapatan pajak hiburan dan persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta mengalami penurunan yang signifikan terhadap Pendapatan Pajak Hiburan dari tahun 2016. Perubahan Pendapatan Pajak Hiburan Kota Bandung adalah 15,2 miliar rupiah dengan persentase 21,88% sedangkan DKI Jakarta adalah -15 miliar rupiah dengan persentase -1,95%. (6) Tahun 2018, jumlah perubahan pendapatan pajak hiburan Kota Bandung lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta, yaitu Bandung sebesar 24,9 miliar rupiah sedangkan DKI Jakarta sebesar 79,4 miliar rupiah. Meskipun demikian, persentase perubahan pendapatan Bandung (29,37%) lebih tinggi dari pada DKI Jakarta (10,53%). (7) Tahun 2019, berbeda dengan tahun lainnya. Pada tahun ini Bandung memiliki jumlah perubahan pendapatan pajak hiburan dan persentase yang jauh lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta. Hal ini disebabkan Bandung mengalami penurunan Pendapatan Pajak Hiburan dari tahun 2018 sebesar 21,3 miliar rupiah dengan persentase -19,43%. Sementara itu, jumlah perubahan pendapatan dan persentase untuk DKI Jakarta adalah sebesar 26,6 miliar rupiah dengan

persentase 3,2%. (7) Rata-rata perubahan Pendapatan Pajak Hiburan per tahun Pemda Kota Bandung adalah 9,5 miliar rupiah dengan persentase 18,66%, sementara untuk Pemda DKI Jakarta adalah 71,6 miliar rupiah dengan persentase 11,87%. Perubahan Pendapatan Pajak Hiburan yang di atas rata-rata terjadi pada tahun 2016, 2017, dan 2018 untuk Pemda Kota Bandung dan pada tahun 2015, 2016, dan 2018 untuk Pemda DKI Jakarta.

4.3 Perbandingan Kinerja Pendapatan Pajak Pemda Bandung dan DKI Jakarta

Kinerja pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan kota wisata yang diwakili oleh Kota Bandung dengan kota bisnis seperti DKI Jakarta tidak sama. Walaupun pendapatan ketiga jenis pajak tersebut DKI Jakarta jauh melampaui Pemda Bandung tidak dengan sendirinya memberikan sumbangan terhadap PAD juga tinggi. Kenyataan Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan rendah tetapi memberikan pengaruh terhadap PAD Pemda Bandung tinggi. Penyebab utama jumlah PAD DKI Jakarta lebih tinggi 16 sampai 18 kali lipat.

4.3.1 Kinerja Pendapatan Pajak Hotel

Tabel 6 (lampiran 2) memperlihatkan dengan jelas kinerja kedua pemerintahan daerah dalam pengumpulan Pajak Hotel yaitu 1) pertumbuhan Pendapatan Pajak Hotel Pemda Bandung dan DKI Jakarta berfluktuasi dimana pertumbuhan paling tinggi 27,6% untuk Pemda Bandung sementara DKI Jakarta hanya 17,5% pada tahun yang sama, sehingga pada saat itu Pemda Bandung memiliki skor 5 atau tinggi sekali dan DKI hanya berskor 4 atau baik. 2) DKI Jakarta pernah mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar minus 7,8% sementara Pemda Bandung 1,8% pada tahun 2018. 3) Total pertumbuhan Pendapatan Pajak Hotel selama lima tahun sebesar 46% sementara DKI Jakarta hanya sebesar 26,9%, walaupun secara rasio lebih besar tetapi jumlah kenaikan selama lima tahun tidak lebih Rp 109,46 milyar rupiah dan DKI Jakarta sebesar Rp 384,0 milyar rupiah. 4). Kenaikan Pajak Hotel rata-rata untuk Pemda Bandung sebesar 9,3% sementara DKI hanya 5,4% secara nominal tidak lebih 280,0 milyar rupiah untuk Pemda Bandung dan 1,56 triliun rupiah untuk DKI Jakarta. 5) total skor kinerja Pendapatan Pajak Hotel Pemda Bandung lebih baik dari pada Pemda DKI Jakarta masing-masing 14,0 dan 12,0 atau bila dirata-ratakan menjadi 2,8 dan 2,4. Perbedaan skor disebabkan Pemda Bandung memperoleh peringkat rendah sebanyak tiga kali dan sedang dan tinggi sekali masing-masing sekali. Sementara Pemda DKI hanya tidak pernah mendapat klasifikasi tinggi sekal dan mendapat rendah sekali dan sedang serta tinggi masing-masing sekali. 6) Total pendapatan pajak hotel yang dihimpun pajak hotel Bandung Rp 1,4 triliun rupiah dan DKI Jakarta 7,84 triliun dan dibandingkan dengan PAD pemda Bandung bergerak dari 11,5% hingga 12,3% atau dalam lima tahun rata-rata tidak lebih 12% (tabel 4) sementara untuk DKI hanya 3.85%.

4.3.2 Kinerja Penerimaan Pajak Restoran

Kinerja Pendapatan Pajak Restoran Pemda Bandung dan DKI Jakarta selama lima tahun (lampiran II) memperlihatkan 1). DKI Jakarta mampu mengumpulkan pendapatan yang lebih baik dari Pemda Bandung. Total Pendapatan Pajak Restoran Rp 14, 25 triliun

untuk DKI dan 1,39 triliun rupiah untuk Pemda Bandung (tabel 4). 2) Pertumbuhan Pajak Restoran tertinggi untuk Pemda Bandung terjadi tahun 2016 sebesar 33,0% dan terkecil terjadi tahun 2019 sebesar Rp 13,3% sementara untuk DKI Jakarta sebesar 25,7% pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2016 sebesar 7,1%. 3) Rata-rata skor pertumbuhan Pemda Bandung sebesar 3.0 sementara DKI hanya 2. Penyebab perbedaan skor adalah Pemda Bandung memperoleh kualifikasi pencapaian tinggi sekali dan rendah tiga kali tinggi sekali sementara DKI Jakarta memperoleh kualifikasi satu kali tinggi sekali dan dua kali rendah sekali serta dua kali dalam kategori renda 4) Pengaruh Pendapatan Restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta dari tahun 2015 hingga 2019 masing-masing 6,8%, 6,7%, 6,3% dan 7,3% serta 7,9% dan untuk pemda Bandung masing-masing 9,8%, 11,2%, 10,8% dan 12,7% serta 14,5%. 5) Pengaruh Pendapatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Pemda DKI Jakarta menunjukkan jumlah 7,0%.

4.3.3 Kinerja Penerimaan Pajak Hiburan

Kinerja penerimaan Pajak Hiburan Pemda Bandung dan DKI Jakarta menunjukkan sebagai berikut, 1) Pendapatan Pajak Hiburan sepanjang 5 tahun untuk Pemda Bandung bergerak antara 2,7% hingga 4,3% sementara pendapatan serupa di DKI Jakarta bergerak dari 1,8% hingga 1,9% 2) kenaikan Pendapatan Pajak Hiburan rata-rata dalam lima tahun sebesar 3,5% untuk Pemda Bandung dan 1,9% untuk DKI Jakarta. 3) Kenaikan terkecil untuk Pemda Bandung sebesar 2,7% pada tahun 2015 dan 1,7% untuk DKI Jakarta pada tahun 2017. 4) DKI Jakarta tidak pernah membukukan pendapatan pajak hiburan sebesar 4,5% sebagaimana di capai Pemda Bandung pada tahun 2018. 5) Secara nominal total Pendapatan Pajak Hiburan Pemda Bandung sebesar Rp 404,1 milyar rupiah dan 3,82 triliun rupiah untuk DKI Jakarta.

V. PENUTUP

- 1) Terdapat pengaruh yang cukup besar secara simultan antara tiga jenis pendapatan pajak dengan Pendapatan Asli Daerah pemda Bandung dan DKI Jakarta masing-masing 92,9% untuk Pemda Bandung dan DKI Jakarta. Secara nominal penerimaan ketiga jenis pajak tersebut DKI Jakarta jauh melampaui Pemda Bandung tetapi secara simultan memilih pengaruh lebih kecil disebabkan jumlah PAD DKI lebih besar 18 kali lipat. Secara parsial terjadi pengaruh negatif antara pendapatan pajak restoran dengan PAD pemda Bandung dan pengaruh tersebut tidak signifikan. Begitu juga pendapatan pajak hiburan berpengaruh negatif terhadap PAD DKI Jakarta dan tidak berpengaruh secara signifikan.
- 2) Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan dari tahun 2015 hingga 2019 dibukukan Pemda DKI selama lima tahun bergerak mulai dari 1,2 triliun Rupiah hingga Rp 1,7 triliun dan sementara Pemda Bandung mulai dari 215 milyar hingga Rp 314 milyar dengan rata-rata pendapatan per tahun Rp 1,6 triliun untuk DKI Jakarta dan Rp 280 milyar untuk Pemda Bandung. Jumlah kenaikan yang berhasil dibukukan selama 5 tahun sebesar Rp 8,2 triliun untuk Pemda DKI dan Rp 1,4 triliun untuk Pemda Bandung. Kondisi serupa juga untuk pendapatan restoran dimana rata-rata pendapatan pajak dari sektor ini sebesar 3,2 triliun rupiah untuk DKI Jakarta dan Rp 279,2 milyar untuk pemda Bandung, Pendapatan pajak dari sektor hiburan merupakan

pendapatan terkecil baik untuk pemda Bandung maupun DKI. Rata-rata dalam lima tahun sebanyak Rp 80,8 milyar untuk Pemda Bandung dan Rp 765,5 milyar rupiah untuk DKI Jakarta

- 3) Pertumbuhan Pendapatan Pajak, Restoran dan Hiburan DKI Jakarta selalu lebih besar dari pada Pemda Bandung sehingga rasio kenaikan tersebut tidak akan pernah melampaui Pemda Bandung. Kenaikan rata-rata Pendapatan Pajak hotel sebesar 9,3% untuk Pemda Bandung dan 5,4% untuk DKI Jakarta. Untuk pendapatan kenaikan rata-rata restoran Pemda Bandung membukukan 21,2% DKI hanya 14,8% begitu juga untuk pendapatan hiburan Pemda Bandung membukukan kenaikan rata-rata sebesar 18,7% dan 11,9% untuk DKI Jakarta
- 4) Kinerja pengumpulan pendapatan pajak hotel dan restoran serta hiburan secara rasio Pemda Bandung lebih baik dari pada DKI Jakarta tetapi secara nominal Pemda Bandung Jauh tertinggal sehingga apabila dinilai kinerja keuangan berdasarkan perbandingan rasio kenaikan pendapatan pajak Pemda Bandung selalu lebih unggul dari pemda DKI Jakarta. Skor pengukuran kinerja menunjukan kinerja pengumpulan Pajak Hotel Pemda Bandung sebesar 2,8 sementara DKI Jakarta hanya 2,4. Untuk kinerja pengumpulan Pajak Restoran Pemda Bandung miliki skor sebesar 3,0 dan DKI hanya 2,0. Begitu juga untuk kinerja pendapatan Pajak Hiburan yang diperoleh sebesar 3,8 untuk Pemda Bandung dan 2,8 untuk pemda DKI Jakarta.

LAMPIRAN 1

Tabel 5. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Pemda Bandung dan DKI Jakarta Tahun 2015-2019 Dalam Jutaan

Tahun	Bandung				DKI Jakarta			
	Pajak Hotel (t)	Pajak Hotel t-1	Pertumbuhan	Persentase (%)	Pajak Hotel (t)	Pajak Hotel t-1	pertumbuhan	Persentase (%)
2015	215.285	225.896	10.611	5,18%	1.276.286	1.168.467	-107.818	-7,79%
2016	274.749	215.285	59.463	27,62%	1.499.798	1.276.286	223.513	17,51%
2017	295.386	274.749	20.637	7,51%	1.560.682	1.499.798	60.884	4,06%
2018	300.756	295.386	5.370	1,82%	1.740.000	1.560.682	179.318	11,49%
2019	314.144	300.756	13.388	4,45%	1.768.198	1.740.000	28.198	1,62%
Jumlah	1.400.319	1.509.788	109.469	46,59%	7.844.965	8.229.059	384.094	26,89%
Rata-rata	280.064	301.958	21.894	9,32%	1.568.993	1.645.812	76.819	5,38%
Tahun	Pajak Restoran (t)	Pajak Restoran (t-1)	Perubahan	Persentase (%)	Pajak Restoran (t)	Pajak Restoran (t-1)	Perubahan	Persentase (%)
2015	181.868	221.060	39.192	27,47%	2.290.255	2.757.742	467.486	25,65%
2016	241.787	181.868	59.919	32,95%	2.453.440	2.290.255	163.185	7,13%
2017	278.760	241.787	36.973	15,29%	2.750.378	2.453.440	296.938	12,10%
2018	325.362	278.760	46.601	16,72%	3.150.000	2.750.378	399.622	14,53%
2019	368.643	325.362	43.282	13,30%	3.615.263	3.150.000	465.263	14,77%
Jumlah	1.396.421	1.622.388	225.967	105,73%	14.259.337	16.051.831	1.792.494	74,18%
Rata-rata	279.284	324.478	45.193	21,15%	2.851.867	3.210.366	358.499	14,84%
Tahun	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan (t-1)	Perubahan	Persentase (%)	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan (t-1)	Perubahan	Persentase (%)
2015	50.449	59.918	9.469	23,11%	608.800	715.126	106.327	21,16%
2016	69.816	50.449	19.367	38,39%	769.540	608.800	160.741	26,40%
2017	85.095	69.816	15.278	21,88%	754.536	769.540	-15.005	-1,95%
2018	110.088	85.095	24.994	29,37%	834.000	754.536	79.464	10,53%
2019	88.702	110.088	-21.386	-19,43%	860.666	834.000	26.666	3,20%
Jumlah	404.151	451.873	47.722	93,32%	3.827.542	4.185.735	358.193	59,34%
Rata-rata	80.830	90.375	9.544	18,66%	765.508	837.147	71.639	11,87%

LAMPIRAN 2

Tabel 6 Pengukuran Kinerja Pengumpulan Pajak Hotel, restoran dan Hiburan Pemda Bandung dan DKI Jakarta

Tahun	Pertumbuhan Pendapatan		Skor Penilaian		Klasifikasi Penilaian	
	Pajak Hotel Bandung (t)	Pajak Hotel Jakarta t-1	Bandung	Jakarta	Bandung	Jakarta
2015	5,2%	-7,8%	2	1	r	rs
2016	27,6%	17,5%	5	4	ts	t
2017	7,5%	4,1%	3	2	s	r
2018	1,8%	11,5%	2	3	r	s
2019	4,5%	1,6%	2	2	r	r
Jumlah	46,6%	26,9%	14	12		
Rata-rata	9,3%	5,4%	2,8	2,4		
	Pajak Restoran Bandung (t)	Pajak Restoran DKI Jakarta (t-1)				
2015	27,5%	25,7%	4	4	t	t
2016	33,0%	7,1%	5	1	ts	rs
2017	15,3%	12,1%	2	1	r	rs
2018	16,7%	14,5%	2	2	r	r
2019	13,3%	14,8%	2	2	r	r
Jumlah	105,7%	74,2%	15	10		
Rata-rata	21,2%	14,8%	3,0	2,0		
	Pajak Hiburan Bandung	Pajak Hiburan DKI Jakarta				
2015	23,1%	21,2%	4	4	t	t
2016	38,4%	26,4%	5	4	ts	t
2017	21,9%	-2,0%	4	1	t	rs
2018	29,4%	10,5%	5	3	ts	s
2019	-19,4%	3,2%	1	2	rs	r
Jumlah	93,3%	59,3%	19	14		
Rata-rata	18,7%	11,9%	3,8	2,8		

Catatan, diolah sendiri dari hasil LKPD R= rendah sekali, R=Rendah, S=Sedang, T=tinggi dan TS=Tinggi Sekali

REFERENSI

Agustina, Oesi. 2013. "Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011) Disusun Oleh :” *Fakultas Ekonomi Universitas Brawijayaa*.

AKBAR, SURYA. 2016. "Analisa Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Dikabupaten Indra Giri Hilir.” (May): 31–48.

Albugis, Febriana F. 2016. "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal EMBA* 4 (3): 78–89.

Butarbutar, Tarida Elisa. 2014. "Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon.” *Jurnal EMBA* 2 (4): 697–704.

Cahyono, Eko Fajar. 2020. "Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan” 3 (April): 61–74.

Dewi, P Ayu Ratna, and Ni Putu Sri Harta Mimba. 2014. "Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8 (3): 442–571..

- Fajar Nugroho, Abdul Rohman. 2012. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai variabel Intervening (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)." *JOURNAL OF ACCOUNTING DIPONEGORO* 1 (1): 1–14.
- Fazlurahman, Faesal, Chandra Fatriananda, and Rifqie Jauhari. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini WTP Dari BPK." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 11 (1): 56. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v11i1.1062>.
- Hadi, Seno Sudarmono, and Restiyana Dyah Ayu Saputri. 2018. "Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta." *Jurnal BSI* 5 (2): 185–94.
- Harahap, Heri Faisal. 2020. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Journal Of Economi and Busines* 4 (1): 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Indira, Dian, Slamet Usman Ismanto, and Meilanny Budiarti Santoso. 2013. "Pencitraan Bandung Sebagai Daerah Tujuan Wisata: Model Menemukanali Ikon Bandung Masa Kini." *Sosiohumaniora* 15 (1): 45. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5238>.
- Kawulur, Sandy, A.M Kolenangan, and Patrick C. Wauran. 2019. "Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19 (03): 107-17.
- KhafiyyaNo, Nida An. n.d. "Akuntansi Aset Tetap (Psap 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur."
- Kurniati, Ida Ayu Emmy. 2016. "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (1): 1290–1318.
- Kurrohman□, Taufik. 2013. "Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur." *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi* 5 (1): 2085–4277.
- Marfiana, Nandhya, and Lulus Kurniasih. n.d. "Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota."
- Maylanny, Christin, and Siti Faridani Fauzan. 2015. "City Branding Kota Bandung Melalui Bus Bandros." *Jurnal Komunikator* Vol.7 No. (1): 88–92.
- Mosal, Mourin M. 2013. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1 (4): 374–82.
- Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12 (2): 874–90.
- Nurasa, Heru. 2013. "Analisis Organisasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Sebuah Sistem Terbuka." *Sosiohumaniora* 15 (1): 80. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5242>.
- Pratiwi, Yuri, and Bambang Pamungkas. 2018. "Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 2 (1): 059–072..

- Putra, A S. 2019. "Smart City: Konsep Kota Pintar Di DKI Jakarta." *Tekinfo* 20 (2): 73–79. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/TEKINFO/article/download/1168/953>.
- Rahman, Arief. 2015. "Revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta Sebagai Upaya Mengembalikan Identitas Kota." *Pesat* 6: 1–8..
- Rahmayanti, Anim. 2016. "Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013." *EKA CIDA* 1 (1): 5.
- Ratifah, Ifa. 2014. "Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang." *Trikonomika* 2 (1): 29–39..
- Riftiasari, Dinar. 2018. "Yayasan Akrab Pekanbaru Analisa Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta ---." *Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (190-200)* 3 (3): 190–200.
- Rinaldi, Udin. 2012. "Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *EKSOS* 8 (2): 105–13.
- Sandy Kawulur, Rosalina A. M. Koleangan, Patr. 2019. "Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Desa Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di 11 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No. 03 Tahun 2019* 19 (3).
- Setia, Azhar Karya. 2008. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah/Kota Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah." *Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Syarifuddin, Didin, Chairul M. Noor, and Acep Rohendi. 2017. "Memaknai Kuliner Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata." *Abdimas* 1 (1): 4–8..
- Urip Santoso, Yohanes Joni Pambelum. 2008. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 4 (1): 216–1249.
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, and Ni Kadek Sinarwati. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah." *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (1): 1–11.
- Wijaya, Ida Bagus Agastya Brahmna, and I Ketut Suidiana. 2016. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangli Periode 2009-2015." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 5 (12): 1384–1407.
- Yulianti, Norma, and Meliza Silvy. 2013. "Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga Di Surabaya." *Journal of Business and Banking* 3 (1): 57–68.
- Zainul Fikri, and Ronny Malavia Marn. n.d. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016) Oleh DaNo Title." *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Unisma*.